

ABSTRAK

INDRA PRATAMA PUTRA. Pemetaan Batas Administrasi Rukun Tetangga (RT) Setelah Pemekaran Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Muara Jawa (di bawah bimbingan AHMAD ARIS MUNDIR SUTAJI)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya data batas administrasi wilayah yang detail, yakni pada tingkat wilayah Rukun Tetangga (RT). Pemetaan batas administrasi wilayah sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT), merupakan salah satu jenis penataan wilayah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta sebagai wujud dari pembangunan wilayah. Utamanya setelah dilakukan pemekaran pada wilayah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Muara Jawa.

Oleh karena itu tujuan dari kegiatan penelitian ini yaitu untuk memetakan batas wilayah Rukun Tetangga (RT) pada Kecamatan Muara Jawa dan Memberikan informasi tentang batas administrasi Rukun Tetangga (RT) setelah pemekaran berbasis partisipasi Masyarakat di Kecamatan muara jawa.

Kegiatan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan 1 Februari 2024 – 29 Februari 2024 untuk mengambil data lapangan kemudian dilanjut pada bulan Maret – Mei 2024 meliputi pengolahan data dan penyusunan laporan yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa. Data yang dikumpulkan berupa data spasial yang disajikan dalam bentuk koordinat kemudian diolah menjadi sebuah peta dan nantinya dapat menampilkan peta batas Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada penelitian ini terdapat 122 Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Muara Jawa. Wilayah Rukun Tetangga (RT) terkecil yaitu Rukun Tetangga (RT) 07 di kelurahan Muara Jawa Pesisir dengan luas 1,022 Ha sedangkan luas wilayah Rukun Tetangga (RT) yang paling besar yaitu Rukun Tetangga (RT) 14 di kelurahan Dondang dengan luas 1,365,57 Ha.

Kata kunci: *pemetaan, batas administrasi, Rukun Tetangga (RT), Muara Jawa.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR HAK CIPTA	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pemetaan.....	7
B. Batas Administrasi	7
C. ArcGIS	8
D. Peta	12
E. GPS Geodetik	13
F. Survey Master.....	14
G. GNSS (Global Navigation Satellite System)	15
H. Metode RTK (Real Time Kinematic)	15
III. METODE PENELITIAN.....	17
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
B. Alat dan Bahan Penelitian	18
C. Prosedur Penelitian.....	19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil.....	29
B. Pembahasan.....	36
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN	41

I. PENDAHULUAN

Kecamatan Muara Jawa merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kecamatan Muara Jawa terletak antara 1160 59' - 1170 24' Bujur Timur dan 00 43'- 00 55' Lintang Selatan dengan luas wilayah 619,16 km². Secara administratif, Kecamatan Muara Jawa berbatasan di Sebelah Utara Kecamatan Sanga-Sanga, Sebelah Timur Kecamatan Anggana dan Selat Makasar, Sebelah Selatan Kecamatan Muara Jawa, Sebelah Barat Kecamatan Loa Janan. Wilayah Kecamatan Muara Jawa terdiri dari delapan Kelurahan, diantaranya Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kelurahan Dondang, Kelurahan Tamapole, Kelurahan Muara Kembang, dan Kelurahan Muara Jawa Pesisir. Ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu. Jarak tempuh Kecamatan menuju Kelurahan Muara Jawa Ilir sekitar 9 kilometer yang dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan Luas wilayah Kelurahan Muara Jawa Ilir adalah 13,41 km² (Saiful, 2020).

Pemetaan partisipatif adalah publik bersama-sama atau terlibat dalam proses pengumpulan data dan analisis terkait problem dan isu di sekitar mereka melalui identifikasi dan penggambaran fitur geospasial dengan menggunakan piranti dan teknologi pemetaan. Pemetaan partisipatif semakin memberi ruang yang lebar terhadap komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, dan juga antar pemangku kepentingan pada daerah pengembangan. Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat/wilayah di mana mereka hidup. Karena masyarakat yang hidup dan bekerja di tempat itulah yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayahnya.

Jadi, hanya mereka yang bisa membuat peta secara lengkap dan akurat mengenai sejarah, tata guna lahan, pandangan hidup, dan harapan masa depan. Manfaat pemetaan partisipatif bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Peta bisa digunakan sebagai media negosiasi dengan pihak lain, karena dengan peta tersebut menjadi jelaslah bagaimana wilayah itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan siapa saja yang berhak atas wilayah itu. Proses pemetaan partisipatif menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, pranata hukum setempat, identifikasi sumber daya alam yang dimiliki, dan sebagainya (Handayani & Cahyono, 2014).

Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 129 tahun 2000. Sedangkan konflik keruangan (spatial conflict) adalah potensi konflik kewilayahan yang timbul akibat adanya garis batas yang membagi satu wilayah menjadi dua wilayah yang berbeda. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah serta pemekaran daerah di Indonesia sebagai negara kepulauan daerah tropis, memiliki karakteristik tersendiri ditinjau dari besarnya jumlah penduduk yang tersebar tidak merata, keanekaragaman sosial budaya, sumber daya alam, flora dan fauna serta keragaman fisik wilayah. Berdasarkan keragaman tersebut, dalam perspektif geografi, Indonesia memiliki potensi konflik kewilayahan yang tinggi. Berdasarkan studi awal yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan model prediktif kuantitatif terhadap data periode tahun 1999 - 2005 terjadi pemekaran 148 daerah otonom baru (141 kabupaten/kota dan 7

provinsi) atau rata rata bertambah 30 daerah otonom baru. Jumlah tersebut melebihi angka perkiraan hasil perhitungan yaitu sebanyak 460 kabupaten dan kota di bawah koordinasi 46 provinsi. Berdasarkan model segi enam Christaller, secara teoritis diperlukan paling tidak 2760 bentuk kerjasama antar daerah otonom yang saling berbatasan untuk mengantisipasi peluang terjadinya 2760 konflik kewilayahan (spatial conflict). Penataan kembali konsep desentralisasi dan pemekaran daerah serta instrument penilaian, terutama kejelasan penetapan batas wilayah, merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan kebijakan otonomi daerah (Harmantyo, 2010).

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan (Mangatur, 2013).

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur selama satu bulan, yaitu pada bulan April 2024. Pengambilan data dilakukan untuk memperoleh batas administrasi RT (Rukun Tetangga) dan kelurahan. Penelitian ini perlu dilakukan karena jika sebuah kecamatan tidak ada peta batas dan luasan wilayah akan sangat berpengaruh pada perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah kecamatan tersebut. Sehingga penting bagi setiap wilayah termasuk Kecamatan Muara Jawa untuk memiliki pemetaan wilayah batas administrasi sebagai dasar untuk mendapatkan kepastian secara legal. Hasil akhir yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah

berupa peta batas secara administrasi RT dan kelurahan beserta luasannya di Muara Jawa setelah pemekaran.

Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. Penelitian berjudul Pemetaan bangunan berizin dan tidak berizin sebagai upaya sinkronisasi pemanfaatan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini telah dilakukan oleh Sari dan Shoimah pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini diperoleh bangunan permukiman yang memiliki izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 270 bangunan atau 0,94% dari total bangunan permukiman di wilayah perencanaan dan Bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 96,56% atau 27.616 bangunan dari total bangunan di wilayah perencanaan
2. Penelitian berjudul Pemetaan Partisipatif Batas Kelurahan Sukolilo di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan oleh Budisusanto pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah peta batas wilayah kelurahan dalam satu kecamatan. Peta batas wilayah adalah salah satu informasi terkini bagi masyarakat dan perangkat pemerintahan yang bersangkutan dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Peta batas wilayah yang jelas dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang saling bersinggungan akan meminimalkan konflik yang terjadi di masyarakat dan masyarakat dapat diberi pemahaman akan keberadaan administratif suatu lokasi/ daerah secara lebih mudah dan jelas.

Berdasarkan 2 penelitian sejenis terdahulu, maka penelitian saya memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut terutama pada objek penelitian saya di Muara Jawa Kutai Kartanegara dan penggunaan *software* untuk pengolahan datanya, dengan begitu penelitian yang penulis lakukan memiliki keterbaruan baik

berupa metode, *software*, dan objek. Dengan demikian penelitian saya layak untuk dilanjutkan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tahapan pengambilan data dan pembuatan peta batas administrasi wilayah Kelurahan dan RT (Rukun Tetangga) yang berada di Kecamatan Muara Jawa berbasis partisipasi masyarakat?
2. Bagaimana batas administrasi Kelurahan dan RT (Rukun Tetangga) yang berada di Kecamatan Muara Jawa?

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini memetakan 6 wilayah kelurahan dari 8 wilayah kelurahan di Kecamatan Muara Jawa.
2. Pengambilan data yang digunakan ini hasil dari Kerjasama partisipasi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tahapan pembuatan peta administrasi wilayah RT dan kelurahan Muara Jawa berbasis partisipasi masyarakat.
2. Menjelaskan proses pengambilan data batas administrasi antara wilayah kelurahan Muara Jawa dan RT (Rukun Tetangga)

Sedangkan hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan batas RT (Rukun Tetangga) hasil dari pemekaran dan juga untuk menghasilkan peta batas administrasi antar RT (Rukun Tetangga) dan batas kelurahan muara Jawa.

Penulis perlu menyatakan bahwa penelitian ini penting dilakukan karena sepengetahuan peneliti sejauh ini Pemetaan Batas Administrasi Rukun Tetangga

(RT) Setelah Pemekaran Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Muara Jawa belum pernah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikresna, P., & Budisusanto, Y. (2014). Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec.Gubeng Dan Kec. Tambaksari). *Geoid*, 9, 195.
- Anonim. (2018). Modul Pembelajaran Arcgis.
https://digilib.esaunggul.ac.id/public/ueu-course-10849-7_0320.pdf
- Fathinah. (2022). "Kartografi Dasar"(Yogyakarta: Ombak). 29.
- Fitrianto. (2017). Pembuatan Panduan Pengukuran Gps Geodetik Dengan Metode Real-Time Kinematic (Rtk) Pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang.
- Handayani, H. H., & Cahyono, A. B. (2014). Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto). *Geoid*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.12962/J24423998.V10i1.705>
- Harmantyo, D. (2010). Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Makara Of Science Series*, 11(1). <https://doi.org/10.7454/Mss.V11i1.220>
- Mangatur. (2013). Evaluasi Desa Pemekaran. Volume 4, Nomor 1, Maret 2013, Hlm. 1-118
- Mudhari, M. A. (2018). Sistem Informasi Pemetaan Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 3(2), 235–241. <https://doi.org/10.35316/Jimi.V3i2.642>
- Perkasa, P. (2019). Use Of Global Positioning System (Gps) For Basic Survey On Students. *Balanga: Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.37304/Balanga.V7i1.553>
- Prasetyaningsih, D. (2012). Partisipasi Indonesia Dalam Pembahasan Sistem Satelit Navigasi Global (Global Navigation Satellite System) Dalam Sidang Uncopuos. 13(4).

Saiful, F., Wahyu Fahrizal. (2020). Peran Kelompok Usaha Bersama (Kub) Nelayan Dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Usaha Di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Open Multidisciplinary Journal.

Saputro, S. Y. (2018). Panduan Penggunaan Comnav T300.
https://www.academia.edu/43248631/Panduan_Penggunaan_Comnav_T300